



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan pelayanan publik yang optimal perlu didukung pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien yang memiliki tujuan dan sasaran strategis dengan indikator yang spesifik, terukur dan rasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mengamanatkan Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyelenggaraan Pemerintahan Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyelenggaraan Pemerintahan Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2);



12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 5).
13. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

#### BAB II TUJUAN

##### Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi Pemerintah Daerah adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja; dan
- c. untuk memperoleh target kinerja tahunan sebagai ukuran keberhasilan tahunan daerah.

#### BAB III KEGUNAAN

##### Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan pada instansi Pemerintah Daerah untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah;

- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

#### BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA

##### Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI KLUNGKUNG,



*[Signature]*

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



*[Signature]*

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021 NOMOR 64

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG**  
**NOMOR 63 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Kinerja				Kondisi Akhir	Sumber Data
				2019	2020	2021	2022		
1	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Cakupan Budaya yang lestari (%)	22,34	23,5	36,56	55,36	74,74	94,71	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
2	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,13	71,13	72,13	73,13	74,13	75,13	Badan Pusat Statistik
3	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% di Tahun 2023	Persentase Penduduk Miskin	6,29	4,91	4,34	3,84	3,39	3	Badan Pusat Statistik
4	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% setiap tahun	Laju Pertumbuhan PDRB	5,34	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	Badan Pusat Statistik
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	54	55	56	58	60	61	Kementerian PAN dan RB (Laporan Hasil Evaluasi RB)
6	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Indeks Demokrasi Daerah	n/a	76,1	77,1	78,1	79,1	80,1	Badan Pusat Statistik
7	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	60	55	54	50	47	45	Data Diolah Kabupaten
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	80	85	86	87	88	89	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian

BUPATI KLUNGKUNG,  
  
**NYOMAN SUWIRTA**





**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG**  
**NOMOR 63 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN KLUNGKUNG**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN/PENJELASAN	TARGET KINERJA						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	SUMBER DATA
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024			
A	2 Dinas Pendidikan Meningkatnya Kualitas Pendidikan Formal	3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase	5	6	7	8	9	10	11	12	
				100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pusat Statistik
				100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan PAUD	4-6 tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut	65,00	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	67,00	Badan Pusat Statistik	
				62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	66,00	66,00	Badan Pusat Statistik	
3	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	Persentase Penduduk Yang Memiliki Ijazah Minimal setara SMA (%)	Perbandingan antara jumlah penduduk usia 25 tahun keatas yang memiliki ijazah setara SMA dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 25 tahun keatas X 100%	53,00	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	57,00	Dinas Pendidikan	
B	Dinas Kesehatan Meningkatnya Mutu Pelayanan Berkembangnya Lingkungan Sehat Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat Tatanan Kabupaten Kota Sehat (%) Persentase Balita dengan Status Gizi Baik (%)	Presentase masyarakat yang puas dengan pelayanan Jumlah tatanan KKS yang terpenuhi dibagi jumlah seluruh tatanan yang ditilai X 100% jumlah balita dengan berat badan normal berdasarkan indeks BB/U dibagi dengan jumlah balita yang ditimbang X 100%	85,00	85	86	87	88	89	89	Dinas Kesehatan	
				44,40	36	35	68	84	85	85	85	Dinas Kesehatan
				88,78	81	82	83	84	85	85	85	Dinas Kesehatan
4	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanganan KLB Kurang Dari 24 Jam (%)	Jumlah KLB yang ditangani kurang dari 24 jam dibagi dengan jumlah KLB X 100%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
5	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Desa yang Melaksanakan Posbindu PTM (desa)	Desa yang Melaksanakan Posbindu PTM (desa) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (107) dibagi jumlah seluruh ibu hamil yang ada di kabupaten X 100%	50	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
				50	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
6	Meningkatnya Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia	Persentase Ibu Bersalin mendapat pelayanan sesuai standar (%)	jumlah persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan (Fasyankes) dibagi sasaran ibu bersalin X 100%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
				100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh balita yang ada X 100%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah anak usia pendidikan dasar (kelas 1 sampai kelas 9) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh usia pendidikan dasar x 100%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	Dinas Kesehatan
		Persentase Lansia mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah sasaran lansia X 100%	82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	Dinas Kesehatan
<b>C</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman</b>										
1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik - sedang dibagi panjang jalan kabupaten yang ada x 100%	83,29%	88,48%	91,23%	93,97%	96,72%	100,00%	100,00%	Dinas PUPRSKP
2	Meningkatkan pemukiman dan lingkungan permukiman yang layak huni	Persentase huasan daerah irigasi yang teraliri air (%)	Luas irigasi kabupaten yang teraliri air bagi luas irigasi kabupaten yang ada x 100%	48,01%	55,00%	59,00%	63,00%	67,00%	71,00%	71,00%	Dinas PUPRSKP
		Cakupan layanan air bersih	Total jumlah penduduk yang terlayani air bersih dibagi total jumlah penduduk di kabupaten Klungkung x 100%	78,98%	79,60%	80,22%	80,84%	81,46%	82,08%	82,08%	Dinas PUPRSKP
2	Meningkatkan pemukiman dan lingkungan permukiman yang layak huni	Persentase kawasan kumuh (%)	Luas kawasan kumuh dibagi luas wilayah yang ada x 100%	N/A	0,64%	0,54%	0,32%	0,19%	0,00%	0,00%	Dinas PUPRSKP
<b>D</b>	<b>Setuan Polisi Pamong Praja dan Pemadatan Kebakaran</b>										
1	Meningkatnya ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat	Angka gangguan kamtibmas	Jumlah gangguan kamtibmas di wilayah Kabupaten Klungkung selama satu tahun	446	446	428	410	382	364	364	Satpol PP dan PMK
<b>E</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>										
1	Terhindarinya dampak bencana	Indeks Risiko Bencana	Penghitungan Indeks Risiko Bencana oleh BNPB. Data rilis web BNPB	163,39	163,39	147,06	132,36	119,13	107,22	107,22	BNPB
<b>F</b>	<b>Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>										
1	Meningkatnya kemandirian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Cakupan PMKS Mandiri	PPKS Mandiri adalah PPKS yang dapat melaksanakan fungsi sosialnya dibagi jumlah PPKS	11,92%	20,79%	30,69%	36,32%	42,00%	47,65%	47,65%	DSPPA
2	Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender	91,06	91,10	91,12	91,14	91,16	91,18	91,18	Badan Pusat Statistik
3	Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks kemampuan dasar pemberdayaan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender	71,77	78,35	78,36	78,37	78,38	78,39	78,39	Badan Pusat Statistik
<b>G</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</b>										
1	Terwujudnya ketahanan pangan	Kecamatan layak anak	Jumlah kecamatan layak anak	N/A	1	2	3	4	4	4	DSPPA
2	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/ akses pangan dan pemanfaatan pangan	80,33	80,33	80,34	80,35	80,36	80,37	80,37	Dewan Ketahanan Pangan
2	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Jumlah produksi perikanan tangkap (kg)	Jumlah ikan yang ditangkap nelayan di laut dalam satu tahun menggunakan sampul	1.210.101	1.210.101	1.234.303	1.258.989	1.284.169	1.309.852	1.309.852	DKUPP
		Jumlah produksi perikanan budidaya (kg)	Jumlah ikan yang diproduksi pembudidaya ikan terdapat di darat dalam satu tahun	1.000.000	1.000.000	1.118.000	1.145.000	1.171.000	1.199.000	1.199.000	DAKP
<b>H</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan</b>										
1	Penurunan beban pencemaran air, tanah dan udara	Indeks Kualitas Air (IPMA)	Pengukuran laboratorium pada sungai utama, hasil masuk rumus perhitungan indeks kualitas air	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	DJLHP



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		badai mata udara (PTM)	Pengaliran dengan uji awal dan pengukuran indeks kualitas udara	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40
		badai mata tanah (PTM)	Perhitungan baku mutu tanah	38,54	38,54	38,54	38,54	38,54	38,54	38,54	38,54
<b>I</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>										
1	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	Cakupan Kemungkinan Dokumen Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan dibag jumlah wajib dokumen kependudukan dikalikan 100%	65%	67,50%	70%	72,50%	75%	77,50%	77,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>J</b>	<b>Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>										
1	Meningkatnya kewardiran desa	Jumlah desa swasembada (desa)	Jumlah desa swasembada sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 (Profil Desa)	0	15	23	32	41	50	53	DPMKPPKB
2	Terwujudnya penduduk tumbuh subur	Total fertility rate sebesar 2,1; laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,1; noise reduction rate sebesar 1 (%)	Kondisi/kependudukan yang idealnya dianda dengan tercapainya Total Fertility Rate 2,1, Net Reproduction Rate sebesar 1 dan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,1%. Ketiga komponen harus dipenuhi sehingga terwujud kondisi penduduk yang tumbuh subur. Mengingat kondisi riil penduduk melewati kriteria penduduk tumbuh subur, maka target yang ingin dicapai adalah penurunan ketiga komponen tersebut, sehingga semakin kecil capaian TFR, NRR dan	97,86	97,86	97,86	98,00	98,50	98,86	98,86	DPMKPPKB
<b>K</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>										
1	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan	Jumlah penumpang angkutan darat (orang)	Jumlah penumpang angkutan darat dalam satuan orang	454.220	472.388	519.626	545.607	572.887	601.531	601.531	Dinas Perhubungan
2	Jumlah penumpang angkutan laut (orang)	Jumlah penumpang angkutan laut (orang)	Jumlah penumpang angkutan laut dalam satuan orang	2.226.214	2.337.925	2.484.401	2.577.121	2.705.977	2.841.276	2.841.276	Dinas Perhubungan
<b>L</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>										
1	Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Dinamis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Evaluasi tingkat kematangan SPBE oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia sesuai Permenpan RB nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,10	2,10	2,10	2,10	2,60	3,10	3,10	Kementerian PAN RB (Hasil Evaluasi SPBE)
<b>M</b>	<b>Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan</b>										
1	Meningkatnya pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT (%)	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT dibagi jumlah Koperasi yang aktif	72,00%	76,00	78,00	80,00	82,00	85,00	85,00	Dinas Koperasi UKM Perdagangan
2	Pertumbuhan volume perdagangan	Persentase pertumbuhan volume perdagangan (%)	lapangan usaha perdagangan tahun (n) - PDRE lapangan usaha perdagangan tahun (n-1)/PDRE lapangan usaha perdagangan tahun (n-1) x 100%	6,90	7,0	7,02	7,04	7,06	7,08	7,08	Dinas Koperasi UKM Perdagangan
<b>N</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>										
1	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Klungkung	Nilai PMA (US \$)	Nilai Realisasi Investasi PMA (US \$)	3.000 US\$	566.000	650.891	754.161	848.431	942.701	3.774.184	DPMPTSP
2	Meningkatnya profesionalisme perijinan dan non perijinan di Kabupaten Klungkung	Nilai PMDN (Rp)	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)	650.000.000	1.051.131.146.722	1.226.319.871.173	1.401.008.190.629	1.576.066.720.000	1.751.882.344.535	5.433.070.954.792	DPMPTSP
		Skor ISM	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00	80,2	80,4	80,6	80,8	81,00	81,00	DPMPTSP
<b>O</b>	<b>Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga</b>										
1	Lesernya Kebudayaan di Kabupaten Klungkung	Persentase Objeke Pemajuan Kebudayaan Yang Lencur (%)	Jumlah objeke pemajuan yang dilaksanakan dibagi jumlah pemaju yang ada dikalikan 100%	N/A	79	79	79	82	82	82	Dabudayaan
2	Meningkatnya kondisi pemuda dan adat di Kab. Klungkung	Jumlah Pemuda Berprestasi (orang)	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat nasional dan regional	N/A	145	145	145	150	155	155	Dabudayaan
		Jumlah Adil Berprestasi (orang)	Jumlah adil berprestasi di tingkat nasional dan provinsi	N/A	112	112	112	118	127	127	Dabudayaan
<b>P</b>	<b>Dinas Kearsifan dan Perpustakaan</b>										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya minat baca masyarakat Klungkung	Jumlah buku yang dipinjam pemustaka (buku)	Jumlah buku yang dipinjam pemustaka di perpustakaan daerah	1547	1547	1747	1947	2147	2347	2347	Dinas Pust
2	Meningkatnya tata kelola kearsipan	Jumlah kunjungan pemustaka di daerah (orang)	Jumlah kunjungan perpustakaan daerah, desa/keurahan, dan sekolah	836247	836247	886247	936247	986247	1036247	1036247	Dinas Pust
Q	<b>Dinas Pariwisata</b>	Indeks Kearsipan Daerah	Nilai audit kearsipan	32	32	39	46	54	62	62	Dinas Pust
1	Meningkatnya Kualitas Pariwisata Kabupaten Klungkung	Jumlah permangkat daerah yang terbit arsip (tunaf)	Jumlah OPD yang terbit arsip	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pust
1	Meningkatnya Kualitas Pariwisata Kabupaten Klungkung	Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan ( hari )	Rata-rata lama tinggal wisatawan asing dan domestik yang menginap di sarana akomodasi wilayah kabupaten Klungkung	3	2	2	2	2	2	2	Dinas Pariwisata
R	<b>Dinas Pertanian</b>	Jumlah Kunjungan Wisatawan ( pengunjung )	Jumlah kunjungan wisatawan DTW di wilayah Kabupaten Klungkung	131.393	131.393	131.393	131.393	136.393	141.393	141.393	Dinas Pertanian
1	Meningkatnya Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Cabe dan Sapi	Produksi Padi (Ton)	Produktivitas padi dikali luas panen padi	32.465	32.465	33.188	34.933	35.318	36.900	36.900	Dinas Pertanian
		Produksi Jagung (Ton)	Produktivitas jagung dikali luas panen jagung	5.742	5.742	5.799	5.896	6.048	6.621	6.621	Dinas Pertanian
		Produksi Kedelai (Ton)	Produktivitas kedelai dikali luas panen kedelai	1.153	1.153	1.211	1.284	1.374	1.511	1.511	Dinas Pertanian
		Produksi Cabe (Ton)	Produktivitas cabe dikali luas panen cabe	1.163	1.163	1.221	1.282	1.346	1.413	1.413	Dinas Pertanian
		Jumlah Populasi Sapi (Ekor)	Pendataan jumlah populasi sapi	42.745	42.745	42.945	43.145	43.345	43.545	43.545	Dinas Pertanian
S	<b>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Kriteria Pengukuran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja oleh BPS Kab. Klungkung	75,45	75,45	75,45	76,15	77,75	79,55	79,55	Badan Pusat Statistik
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Pekerja (%)	Jumlah pekerja dengan peningkatan karier dan pendapatan pekerja dibagi jumlah pekerja dikalikan 100%	N/A	28,27	32,56	32,75	37,9	42,51	42,51	Diapremaker
T	<b>Sekretariat Daerah</b>	Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah (%)	Jumlah Capaian IKU seluruh PD dibagi jumlah PD	N/A	65	70	75	80	85	85	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
1	Tercapainya prioritas pembangunan daerah	Persentase prolegda yang disepakati bersama eksekutif (%)	Jumlah prolegda yang disepakati bersama eksekutif dibagi jumlah prolegda yang dibahas bersama eksekutif dikalikan 100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Sekretariat DPRD
U	<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	Jumlah desa dengan klasifikasi desa swasembada (desa)	Jumlah desa swasembada dari data DPMDPPKB	n/a	0	0	0	2	4	4	Kec. Klungkung
1	Terwujudnya masyarakat desa swasembada	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil hitung survey kepuasan masyarakat sesuai Permintaan 14 tahun 2017 tentang pedoman Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	88,31	88,31	88,32	88,33	88,34	88,35	88,35	Kec. Klungkung
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Jumlah potensi konflik/kerawanan sosial (potensi)	Jumlah potensi kerawanan sosial di wilayah Kecamatan Klungkung berdasarkan hasil monitoring	4	4	4	4	3	2	2	Kec. Klungkung
3	Menurunnya potensi konflik	Jumlah pelanggaran Perda/Perbup (kasus)	Jumlah pelanggaran perda/perbup yang dilangan	200	200	200	200	180	150	150	Kec. Klungkung
4	Meningkatnya ketataan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah desa dengan status swasembada (desa)	Jumlah desa swasembada dari penghitungan DPMDPPKB	1	1	2	6	9	12	12	Kec. Banjaranghlan
W	<b>Kecamatan Banjaranghlan</b>	Jumlah desa dengan status swasembada (desa)	Hasil hitung survey kepuasan masyarakat sesuai Permintaan 14 tahun 2017 tentang pedoman Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Banjaranghlan
1	Meningkatnya kemandirian desa di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah potensi kerawanan sosial di wilayah Kecamatan Nusa Penida berdasarkan hasil monitoring	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Banjaranghlan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Jumlah potensi konflik/kerawanan sosial (potensi)	Jumlah potensi konflik/kerawanan sosial (potensi)	4	4	4	4	4	4	4	Kec. Banjaranghlan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Perda/Perbup (kasus)	Jumlah pelaksanaan Perda/Perbup yang ditangani	200	200	200	200	200	200	200	200
<b>X</b>	<b>Kecamatan Nusa Penida</b>										
1	Terwujudnya masyarakat desa swasembada	Jumlah desa dengan klasifikasi desa swasembada (desa)	Jumlah desa swasembada dari data DPM/DPFKB	8	8	10	12	14	16	16	Kec. Nusa Penida
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil hitung survey kepuasan masyarakat sesuai Permenpan 14 tahun 2017 tentang pedoman Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	88,31	88,31	86,32	86,33	86,34	86,35	86,35	Kec. Nusa Penida
3	Menurunnya potensi konflik	Jumlah potensi konflik/kerawanan sosial (potensi)	Jumlah potensi kerawanan sosial di wilayah Kecamatan Nusa Penida berdasarkan hasil monitoring	4	4	4	4	3	2	2	Kec. Nusa Penida
4	Meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Perda/Perbup (kasus)	Jumlah pelaksanaan Perda/Perbup yang ditangani	200	200	200	200	180	150	150	Kec. Nusa Penida
<b>Y</b>	<b>Kecamatan Dawuan</b>										
1	Meningkatnya kemandirian desa di kecamatan	Jumlah desa dengan status swasembada (desa)	Jumlah desa swasembada dari penghitungan DPM/DPFKB	0	1	2	6	9	12	12	Kec. Dawuan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil hitung survey kepuasan masyarakat sesuai Permenpan 14 tahun 2017 tentang pedoman Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	88,31	88,31	86,32	86,33	86,34	86,35	86,35	Kec. Dawuan
3	Menurunnya potensi konflik	Jumlah potensi konflik/kerawanan sosial (potensi)	Jumlah potensi kerawanan sosial di wilayah Kecamatan Nusa Penida berdasarkan hasil monitoring	4	4	4	4	3	2	2	Kec. Dawuan
4	Meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Perda/Perbup (kasus)	Jumlah pelaksanaan Perda/Perbup yang ditangani	200	200	200	200	180	150	150	Kec. Dawuan
<b>Z</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>										
1	Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Klungkung	Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung	Hasil pengukuran tiga variabel INSTAPOLU yaitu pertumbuhan ekonomi, perkembangan pemerintahan dan partisipasi politik	N/A	80,6	81,6	82,6	83,6	84,6	84,6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>AA</b>	<b>Inspektorat</b>										
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Hasil penghitungan Kementerian PAN dan RB disajikan dalam LHE Reformasi Birokrasi	3,40	3,42	3,44	3,46	3,48	3,50	3,50	Kementerian PAN dan RB (Laporan Hasil Evaluasi RB)
<b>BB</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan</b>										
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen perencanaan pada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai komponen perencanaan pada hasil asesmen AKIP Kabupaten Klungkung oleh KementPAN RB	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25	Kementerian PAN RB (Laporan Hasil Evaluasi SAKIP)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan daerah	Persentase hasil kelibangan yang dimanfaatkan	Jumlah hasil kelibangan yang dimanfaatkan dibagi jumlah seluruh hasil kelibangan	63,64	80	80	80	100	100	100	Superfishing
3	Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah Berpredikat "Sangat Inovatif"	Hasil penilaian Kemendagri, Predikat "Sangat Inovatif" = 100%, "Inovatif" = 75% dan "Kurang Inovatif" = 50%	100	100	100	100	100	100	100	Kementerian Dalam Negeri
<b>CC</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Daerah</b>										
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil kali bobot dimensi dengan indeks dimensi sesuai dengan pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020. Peringkat IPKD (A = Baik, B = perlu perbaikan, C = Sangat perlu perbaikan)	0	A	A	A	A	A	A	BPKPD Kab. Klungkung
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase nilai temuan aset dibagi jumlah total aset daerah (%)	Persentase nilai temuan aset dibagi jumlah total aset daerah dikali 100%	0	7	5	3	2	1	1	BPKPD Kab. Klungkung



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD (%)	Realisasi PAD Tahun (n) - Realisasi PAD Tahun (n-1) dibagi realisasi PAD Tahun (n-1) dikali 100%	0	24,82	39,24	55,88	70,03	100	100	BPKPD Kab. Klungkung
DD	<b>Badan Kepegawaian dan Pengerintahan SDM</b>										
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Persentase PNS dengan Indeks Profesionalitas Tinggi (%)	Jumlah Nilai Indeks Profesionalitas ASN khusus PNS Pemerintah Kabupaten Klungkung dibagi jumlah PNS dikalikan 100%. Indeks Profesionalitas ASN menyangkut 4 dimensi yaitu : dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Kualifikasi dapat dilihat dari pendidikan formal PNS, Kompetensi dapat dilihat dari perijinan kinerja dan SKP, Disiplin dapat dilihat dari pelanggaran disiplin PNS sesuai PP No. 53 Tahun 2010.	30,25%	62,70%	62,70%	63,70%	63,80%	64%	64%	BKPSDM



BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA